



**PERISTIWA 27 JULI 1996 DAN PENGARUHNYA TERHADAP
POSISI MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM
PANGGUNG POLITIK NASIONAL 1996-1999**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun Oleh:

**Firman Adi Laksono
NIM 13030112130088**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Firman Adi Laksono, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 17 Mei 2017
Penulis,

Firman Adi Laksono
NIM 13030112130088

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

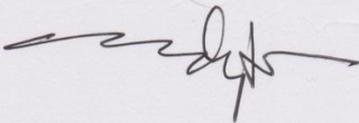
“Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor, tetapi suatu saat dimana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah”

Soe Hok Gie

Dipersembahkan untuk:

Kedua Orang Tua, adik-adik,
Sahabat dan Kekasih Tercinta.

Disetujui,
Dosen pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. To the left of the signature, there is a separate, simple checkmark-like symbol.

Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19640711 199001 1 001

Skripsi dengan Judul "Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999" yang disusun oleh Firman Adi Laksono (13030112130088) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 17 Mei 2017.

Ketua,



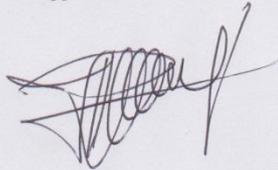
Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 196106051986032001

Anggota I,



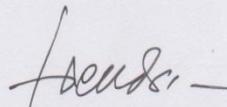
Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum.
NIP 196407111990011001

Anggota II,



Dr Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP. 196703111993031004

Anggota III,



Mahendra P. Utama, S.S., M.Hum.
NIP 1971022419993031001



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Diponegoro

Dr. Redyanto Noor, M.Hum.
NIP 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999.” Selain didasarkan pada pentingnya penulisan mengenai sejarah politik Indonesia, pemilihan tema ini juga dilakukan karena kedekatan emosional penulis terhadap politik. Selain penulis adalah seorang yang berlatar belakang pendidikan sejarah, penulis juga merupakan seorang yang senang mengamati militer dan politik. Lebih lanjut, skripsi ini disusun untuk menempuh ujian akhir Program Strata-I pada Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa material maupun spiritual kepada yang terhormat: Prof. Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Indriyanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Drs. Sugiyarto, M.Hum., selaku dosen wali, yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap dosen penguji: Prof. Dr. Yetty Rochwulaningsih, M.Si., Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., Mahendra P. Utama, S.S., M.Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis haturkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis haturkan kepada segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal. Secara khusus penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Mochammad Annas, S.S., yang telah menjadi teman diskusi dengan pemikiran-pemikiran yang aktual. Pinjaman koleksi buku-bukunya yang berkaitan dengan tema skripsi ini sungguh menjadi sumbangan yang tidak ternilai harganya.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua, Sariyun dan Insiyah, serta adik-adik penulis yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, ucapkan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para sahabat: Drs. Bambang, Dra. Pretty, Kuswanto, “Rondo”, Togar, “Barpe”, Mas Yuka, Aji, Kudus Purnomo, Rufal Febrian, Ichsan Nur Faiz, Aprilia Putri Utami, Hainfah, Dian Pangestu, Arif Syaefudin, Julius Prabowo, Achmad Rahdian Umar, Okik Bagus, Ayu Rahmawati, serta sahabat-sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas kebersamaannya selama ini.

Skripsi ini pada hakikatnya sangat jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Meski sedikit, semoga skripsi ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Mei 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
INTISARI	xix
SUMMARY	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONDISI POLITIK PADA MASA ORDE BARU	22
A. Struktur Politik	22
B. Kondisi Partai Politik	27
C. Pengebirian Partai Politik oleh Penguasa	43
D. Dominasi Golongan Karya	49
E. Proses Lahirnya PDI	55
BAB III PERISTIWA 27 JULI 1996	59
A. Dari Kongres Surabaya sampai Kongres Medan	59
B. Intervensi Pemerintah di Tubuh PDI	70
C. Dualisme Kepengurusan DPP-PDI	74
D. Aksi Mimbar Bebas	78
E. Kronologisasi Peristiwa 27 Juli 1996	84
BAB IV PENGARUH PERISTIWA 27 JULI 1996 TERHADAP MUNCULNYA MEGAWATI SOEKARNOPUTRI DALAM PANGGUNG POLITIK	94
A. Pengaruh Peristiwa 27 Juli 1996	90
B. Dari Masa Kelam Megawati Menuju Panggung Politik Nasional	101
C. Dukungan Rakyat terhadap PDI Mega	109

D. Perubahan PDI Menjadi PDI Perjuangan	118
1. Konflik Internal PDI	118
2. PDI Mega Menjadi PDI Perjuangan	124
E. Megawati Dicalonkan Menjadi Presiden	133
F. Kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 1999	139
BAB V SIMPULAN	143
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	153

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Asosspol	: Asisten Sosial Politik
Bakorstanasda	: Badan Koordinasi Stabilitas Nasional Daerah
BIA	: Badan Intelejen ABRI
Brigjen	: Brigade Jendral
BU	: Budi Utomo
Caleg	: Calon Legislatif
<i>Co</i>	: <i>Cooperatif</i>
Dandim	: Komandan Distrik Militer
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
Deppen	: Departemen Penerangan
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
G30S	: Gerakan 30 September
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Golkar	: Golongan Karya

Kaditsosspol	: Kepala Dierektorar Sosial Politik
Kakansospol	: Kepala Kantor Sosial Politik
Kapolwiltabes	: Kepala Polisi Wilayah Kota Besar
Kapuspen	: Kepala Pusat Penerangan
Kasad	: Kepala Staff Angkatan Darat
Kasosspol	: Kepala Sosial Politik
Kasum	: Kepala Staff Umum
Keppres	: Keputusan Presiden
KKN	: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
KLB	: Kongres Luar Biasa
Kodim	: Komando Distrik Militer
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kontras	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
Kudatuli	: Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli
Lanud	: Landasan Udara
Letjen	: Letnan Jendral
Letkol	: Letnan Kolonel
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
Mabes	: Markas Besar
Mayjen	: Mayor Jendral
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
Menko Polkam	: Menteri Koordinator Politik Keamanan
Mensesneg	: Mentri Sekertaris Negara
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat

Munas	: Musyawarah Nasional
<i>Non-co</i>	: <i>Non-Cooperatif</i>
NU	: Nahdlatul Ulama
Orba	: Orde Baru
Orpol	: Organisasi Politik
P-4	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Pangab	: Panglima Angkatan Bersenjata
Pangdam	: Panglima Kodam
Pangkopkamtib	: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
Pangkostrad	: Panglima Komando Strategis Angkatan Darat
Parmusi	: Partai Muslim Indonesia
Parpol	: Partai Politik
Partindo	: Partai Indoensia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
PUDI	: Partai Uni Demokrasi Indonesia
Purn.	: Purnawirawan
Rakor Polkam	: Rapat Kordinasi Politik Kemanan
<i>RD</i>	: <i>Relative Deprivation</i>
RI	: Republik Indonesia
RSPAD	: Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat

Satgas	: Satuan Tugas
Sekjen	: Sekertaris Jendral
SI	: Sarekat Islam
SMID	: Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SU MPR	: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TPDI	: Tim Pembela Demokrasi Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

DAFTAR ISTILAH*

- Aklamasi* : Pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta Kongres terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara. Merujuk pada pernyataan setuju untuk menjadikan Megawati ketua umum pada KLB Surabaya 1993.
- Anomali Politik* : Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat untuk mendapatkan jabatan publik. Upaya ini kerap kali dilakukan pada masa pemerintahan Orba.
- Asas Ciri* : Dasar, merujuk pada sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat Parpol pada masa Orba.
- Caretaker* : Panitia dalam sebuah rapat, merujuk pada pengurus Kongres PDI Surabaya.
- Das Sein* : Segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala sesuatu yang diatur dalam *das sollen*.
- Das Sollen* : Segala sesuatu yang merupakan keharusan.
- Deadlock* : Macet atau buntu, merujuk pada jalannya Kongres yang tidak menemui hasil.
- Dominant Party* : Partai yang dominan, kedudukan partai yang bersangkutan tanpa saingan partrai lain. Sebutan ini diberikan pada Golkar, karena pada masa Orba Golkar merupakan partai yang sangat dominan.
- Floating Mass* : Kebijakan politik Orba untuk menciptakan masyarakat yang mengambang dalam politik atau masyarakat yang tidak memiliki ikatan dengan salah satu partai politik di tingkat lapisan bawah masyarakat.
- Fusi* : Penggabungan atau peleburan beberapa partai menjadi satu partai.
- Koalisi-partai* : Persekutuan, aliansi, atau gabungan dari beberapa partai politik, yang mana dalam kerjasama, tiap-tiap kelompok memiliki kepentingan masing-masing.

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi dan pendapat pribadi.

- Konsensus Nasional : Suatu kesepakatan nasional atau kesepakatan para pemimpin kekuatan sosial politik yang mewakili kekuatan sosial dalam masyarakat sebagai hasil dari musyawarahnya dalam rangka mencapai cita-cita bangsa.
- Kuda Hitam : Kekuatan yang semula tidak diperhitungkan akan menang, tetapi akhirnya menjadi pemenang. Merujuk pada kekuatan PKI yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
- Kudeta : Perebutan kekuasaan dengan paksa.
- Legowo* : Lapang dada, merujuk pada sikap Soerjadi yang sudah menerima kenyataan bahwa dirinya harus digantikan oleh Megawati.
- Loyalitas Penuh : Tekad dan kesanggupan menaati, melaksanakan serta mengamalkan sesuatu dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab.
- Mimbar Bebas : Kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu. Terkait skripsi ini berhubungan dengan Mimbar Demokrasi sebelum dilakukan penyerangan pada 27 Juli 1996.
- Nation-States* : Sebuah istilah politik yang berarti warga negara yang tinggal di suatu negara juga merupakan bangsa yang sama.
- Organisasi Tanpa Bentuk : Upaya dari sekelompok orang/golongan untuk merebut kekuasaan atas pemerintahan yang sah. Merujuk pada tuduhan yang diberikan pemerintah terhadap PRD, bahwa PRD merupakan OTB.
- Onderbouw* : Organisasi-organisasi sayap partai untuk menampung hasil rekrutmen para kader-kader parpol secara lebih luas.
- Panggung Politik : Mimbar untuk anggota perwakilan menyampaikan pandangannya sebelum pemilihan umum.
- Partai Hagemoni : Partai yang kekuasaannya dapat mempengaruhi partai lain karena kemayoritasannya.
- Partai Politik : Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau

dibentuk dengan tujuan khusus.

- Pembersihan Politik : Berbagai upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan lawan politik oleh golongan tertentu. Merujuk pada upaya pemerintah pasca penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli, dengan menuduh para aktivis sebagai dalang di balik huru-hara tersebut.
- Reduksionistis : Melihat semesta secara sederhana dan menganggap semua dapat diselesaikan oleh logika.
- Sabtu Kelabu : Penyebutan ini merujuk pada hari saat terjadinya peristiwa 27 Juli 1996, di kantor DPP PDI.
- Srikandi Kembar : Istilah yang merujuk pada keadaan dimana adanya persaingan menuju panggung politik antara Megawati dan Rukmana.
- Status Quo* : Suatu kondisi statis yang tidak ada perubahan, penambahan dan perbaikan. Istilah ini merujuk pada kondisi kantor DPP PDI pasca penyerangan gelombang pertama.
- Subversi : Gerakan/tindakan/perencanaan untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara diluar Undang-Undang.
- Sumpah Rakyat : Sumpah Pemuda yang diubah kata-katanya, merujuk pada aksi massa saat membacakan tuntutan pada 27 Juli 1996.
- UU Anti Subversi : Menjabarkan delapan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan makar.
- With Majority Bent* : Suara mayoritas, pada tahap pemilu partai yang bersangkutan menguasai mayoritas suara. Merujuk pada suara yang diperoleh oleh Golkar pada pemilu dimasa Orba.
- Wong Cilik* : Sebuah istilah yang digunakan untuk membedakan status sosial dalam masyarakat Jawa. Istilah ini merujuk pada masyarakat Jawa kelas bawah.

DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
3.1.	Aksi Pengumpulan 2 Juta Tanda Tangan untuk Mendukung Megawati pada saat dilakukan <i>Long-march</i> tahun 1996.	71
3.2.	Aksi Mimbar Bebas di halaman kantor DPP PDI yang Dihadiri Megawati Soekarno Putri pada tahun 1996.	81
3.3.	Serangan gelombang I yang dilakukan oleh para pendukung beratribut Pro Kongres Medan	85
3.4.	Bentrokan antara Massa dengan Polisi Antihuruhara.	86
3.5.	Diskusi antara Pendukung Megawati dengan Dandim Jakarta Pusat Letkol Zul Efendi.	89
4.1.	Dukungan dari kelompok API untuk Megawati agar dicalonkan menjadi Presiden periode 1999-2004	134

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
A. Panji-Panji Rakyat Demokratik	153
B. Catatan Komnas HAM Mengenai Peristiwa 27 Juli	157
C. Catatan Sidang Perkara Terdakwa Peristiwa 27 Juli	174
D. Siaran Pers Menkopolkam No. 40/Humas Polkam/VII/1996	178
E. Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI No. 1/Ketum/1996	179
F. Data Penangkapan Aktivis Pro-Demokrasi Mengenai Peristiwa 27 Juli	181
G. Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI No. X/Ketum/IV/1997	184
H. Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI No. XI/Ketum/IV/1997	186
I. Pesan Harian Ketua Umum DPP PDI No. XII/Ketum/IV/1997	188

RINGKASAN

Melalui metode sejarah, skripsi ini mengkaji mengenai peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional, dari tahun 1996-1999. Beberapa permasalahan yang dikaji yaitu: *Pertama*, mengapa dan bagaimana peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. *Kedua*, bagaimana pengaruh peristiwa 27 Juli 1996 terhadap munculnya Megawati dalam panggung politik nasional. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: a) Heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder. b) Kritik Sumber, proses yang dilakukan untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. c) Interpretasi menafsirkan dan menyusun antara fakta satu dengan lainnya. d) Historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan melalui konsep politik, gerakan sosial, dan *relative deprivation* untuk membedah latar belakang peristiwa 27 Juli, serta motif-motif yang melatarbelakangi dukungan rakyat terhadap Megawati Soekarnoputri.

Peristiwa 27 Juli ini dilatarbelakangi oleh berbagai rentetan konflik dalam tubuh PDI, yang ditandai dengan munculnya nama Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan menjadi ketua umum pada KLB Surabaya tahun 1993. Kemunculan Megawati ternyata di luar skenario Pemerintah Soeharto dan dianggap sebagai ancaman serius bagi eksistensi kekuasaan Orba, karena pada saat yang bersamaan Pemerintah Orba sedang mengorbitkan Siti Hardiyanti Rukmana melalui jalur Golkar, sehingga muncul istilah tidak boleh ada dua “Srikandi Kembar”. Berbagai upaya dari yang ringan hingga yang berat dilakukan pemerintah Orba untuk “mengkudeta” Megawati dari jabatannya. *Pertama*, tidak diakuinya hasil KLB Surabaya 1993, karena hasil KLB Surabaya telah menentukan bahwa Megawati adalah ketua umum PDI periode 1993-1998. Namun pemerintah menolak hasil kongres tersebut dan menganggap kongres tidak berhasil menetapkan ketua umum. *Kedua*, menciptakan dualisme kepengurusan PDI, dengan memunculkan kembali nama Soerjadi sebagai ketua umum PDI versi pemerintah. *Ketiga*, mengadakan kongres rekayasa Medan tahun 1996, dengan tujuan untuk mengesahkan kembali Soerjadi sebagai ketua umum PDI. *Keempat*, aktivitas yang dilakukan oleh para pendukung Megawati di kantor DPP PDI, kemudian dinamakan sebagai Mimbar Bebas. Aksi ini, membuat mereka yang terkena sasaran kritik merasa gerah. Untuk itu, pemerintah menginstruksikan agar kegiatan Mimbar Bebas segera dihentikan. *Kelima*, pengambilalihan kantor DPP PDI secara paksa oleh kubu Soerjadi dan pemerintah pada 27 Juli 1996, yang mengakibatkan kerusuhan massa di Jakarta.

Pasca peristiwa tersebut banyak korban luka maupun meninggal akibat bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan aparat keamanan. Menurut angka resmi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tanggal 12 Oktober 1996, penyerbuan kantor DPP PDI tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, 23 orang hilang dan 136 orang ditahan. Dalam laporan Komnas

HAM tersebut mengenai jumlah korban meninggal, tidak menutup kemungkinan angka jumlah korban yang meninggal terkait peristiwa 27 Juli tersebut akan bertambah.

Ternyata berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk “mengkudeta” Megawati dari jabatannya, yang mencapai puncaknya pada peristiwa 27 Juli membawa dampak positif bagi karier berpolitiknya. Megawati sebagai tokoh politik yang lahir dari kekerasan politik pemerintah Orba, mendapat dukungan penuh dari rakyat. Setiap kehadirannya selalu disambut hangat oleh rakyat. Banyak yang meyakini bahwa Megawati dianggap sebagai lambang perlawanan rakyat, simbol pemersatu rakyat, untuk melawan pemerintah Orba yang otoriter. Hingga puncaknya, Megawati dicalonkan menjadi Presiden pada pemilu tahun 1999, yang diusung oleh PDI Perjuangan.

SUMMARY

Through historical method, this thesis examines the events of July 27, 1996 and its Influence on the Position of Megawati Soekarnoputri in the National Political Stage from 1993 to 1999. Some of the issues to be studied are: *First*, why and how the events of July 27, 1996 occurred. *Second*, how was the influence of 27 July 1996 on Megawati's emergence on the national political stage. To examine the problem, a critical historical method consists of four stages: A) Heuristics, searching and collecting historical sources, both primary and secondary sources. B) Source Criticism, the process undertaken to obtain source authenticity and credibility. C) Interpretation interpret and compile between facts with each other. D) Historiography, the process of rewriting historical events. Thus, the writing of this thesis uses approaches through political concepts, social movements, and relative deprivation to examine the background of 27 July incident, as well as the motives behind the popular support for Megawati Soekarnoputri.

The 27 July incident was motivated by a series of conflicts within the PDI, which was marked by the emergence of Megawati Soekarnoputri's name to be nominated as chairman of KLB Surabaya in 1993. Megawati's appearance was outside the scenario of the Soeharto government and was considered a serious threat to the existence of Orba rule, at the same time Orba government was orbit Rukmana Putri through Golkar. So the term appears there should be no "Twins Srikandi". Efforts from the mild to severe of Orba government to "Carry out a coup" Megawati from his post. *Firstly*, did not admit the outcome of KLB Surabaya 1993, because KLB Surabaya had determined that Megawati was the chairman of the PDI for the period of 1993-1998, but the government had refused the congress and deemed the congress unsuccessful to appoint the chairman. *Second*, to create dualism of PDI management, by bringing back the name Soerjadi as the government version of PDI. *Third*, holding a Medan congress in 1996, with the aim of re-assign Soerjadi as chairman of the PDI. *Fourth*, The activities carried out by Megawati's supporters at the PDI's PDI office, were later named as Free Mimbar. This action, making those who hit the target criticism feel hot. To that end, the government instructed that the activities of Free Mimbar should be stopped immediately. *Fiveth*, the forced takeover of the PDI office by Soerjadi and the government on July 27, 1996, resulting in mass riots in Jakarta.

After the incident many people were injured and died from clashes between Megawati supporters and security forces. According to official figures released by Komnas HAM on October 12, 1996, the PDI office raid left 5 people dead, 149 wounded, 23 missing and 136 arrested. In the Komnas HAM report on the death toll, did not rule out the number of deaths related to the 27 July incident will increase.

It turned out that the government's efforts to "Carry out a coup" Megawati from her post, which culminated in the July 27 event brought a positive impact on her political career. Megawati as a political figure born of the political violence of

Orba government, received the full support of the people. Every presence is always warmly welcomed by the people. Even Megawati is regarded as a symbol of popular resistance, the unifying symbol of the people, against the authoritarian Orba government. To it's peak, Megawati was nominated to become president in the 1999 election, which was carried by PDI Perjuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Orde Baru (Orba) adalah sebuah rezim yang lahir untuk menggantikan Orde Lama (Orla). Berawal dari “Surat Perintah 11 Maret” atau “Supersemar” yang menjadi titik awal lahirnya Orba, sebab dengan Supersemar itulah Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengambil tindakan-tindakan pembaharuan dan stabilitas politik. Melalui Supersemar itulah sebenarnya kekuasaan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya menjadi lenyap. Lenyapnya kekuasaan Soekarno kemudian diperkuat dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat (MPRS), melalui sidang istimewa pada tahun 1967 mengangkat Letnan Jendral (Letjen) Soeharto sebagai pejabat presiden, sehingga Soekarno tidak diakui sebagai pemegang kekuasaan. Kemudian pada bulan Maret 1968 MPRS mengangkat dan melantik Letjen Soeharto sebagai presiden.¹

Pada perkembangannya, Orba mengklaim stabilitas dan pembangunan harus segera ditegakkan, namun model stabilitas dan pembangunannya menindas dan menelantarkan rakyat. Beratnya beban ekonomi pada saat itu yang dipikul bersama, dan merupakan akibat langsung, dari akumulasi perampasan kedaulatan rakyat kita selama lebih dari seperempat abad. Peringatan Bung Hatta terhadap Demokrasi Terpimpin juga berlaku terhadap sistem Orba. Tanpa kedaulatan rakyat, keduanya hanyalah “bangunan kertas”. Lantaran tiadanya kedaulatan tersebut perusakan atas sendi-sendi politik, ekonomi, dan hukum oleh rezim Soeharto dibiarkan terus bertumpuk hingga negara, dan bangsa kita tidak kuasa lagi memikulnya. Semua itu bertolak dari keserakahan tidak kenal batas.

¹Marwati Djoened Poesponegoro, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, (edisi) Pemutakhiran (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 543-546.

Rangkaian kekerasan dan kecurangan sepanjang pemilihan umum pada masa pemerintah Orba dari tahun 1971 sampai dengan 1997 adalah bukti sejarah yang tidak terbantahkan dari kesombongan dan kesewenang-wenangan terhadap rakyat.² Bukti-bukti lainnya yang dapat dijadikan contoh, yaitu: Peristiwa Malari 1974, peristiwa berdarah Timor Timur 1975, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Dili 1991, dan Peristiwa 27 Juli 1996, serta pembantaian biadab terhadap Marsinah (sisi paling kelabu dari kriminalisasi panjang atas perjuangan kaum buruh untuk memperoleh hak-hak asasinya). Semua itu merupakan bukti dari format darurat-monopolistik Orba.³

Sepertinya akan terlalu banyak penjelasan jika kita membahas satu per satu insiden tersebut. Pada penulisan skripsi ini, akan mengambil topik tentang “Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati dalam Panggung Politik Nasional”. Jakarta dilanda huru-hara pada Sabtu, 27 Juli 1996 (Kudatuli, akronim dari Kerushuan Dua Puluh Tujuh Juli). Peristiwa ini membuat ibu kota Jakarta membara, yang kemudian diikuti memanasnya suhu politik nasional. Warga Jakarta seperti tersentak, bagaimana tidak, peristiwa 27 Juli mengingatkan mereka pada peristiwa kekerasan politik sebelumnya, seperti peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Rentetan peristiwa yang sering disebut “Sabtu Kelabu” itu adalah “para pelakunya”, 124 orang divonis penjara. Mereka adalah Satuan Tugas (Satgas) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Megawati yang mempertahankan kantor PDI dari serangan pendukung Soerjadi. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang membentuk tim

²A. Ariobimo Nusantara, R. Masri Sareb Putra dan Y.B. Sudarmanto, *Aksi Mahasiswa Menuju Gerbang Reformasi* (Jakarta: Grasindo, 1998). hlm. xviii.

³Format darurat politik Orde Baru didasarkan atas dua nalar: *Pertama*, bersifat darurat karena merupakan solusi atas keadaan yang benar-benar darurat dalam periode 1965-1969. *Kedua*, bersifat darurat karena, sama halnya dalam keadaan darurat perang, kebijakan politik/ekonominya bersifat komando—pantang dipertanyakan, apalagi dibantah.

pencari fakta atas peristiwa tersebut telah mengumumkan temuannya pada tanggal 12 Oktober 1996.⁴

Suasana yang berkaitan dengan peristiwa 27 Juli tersebut memang masih simpang siur hingga saat ini. Bukan saja soal jumlah korban jiwa atau orang yang hilang, melainkan juga terhadap peristiwa itu sendiri. Jumlah korban yang meninggal memang belum atau bahkan tidak akan tuntas terungkap. Pemerintah menyatakan bahwa jumlah korban yang tewas adalah 4 orang, sedangkan versi Komnas HAM adalah 5 orang.⁵ Sementara versi satgas Megawati yang tidak diumumkan secara resmi, berhubung kurang kuatnya bukti—korban meninggal mencapai belasan. Soal jumlah korban meninggal ini, dalam laporan Komnas HAM ada catatan, bahwa: “tidak menutup kemungkinan angka jumlah korban yang meninggal berhubungan dengan peristiwa 27 Juli akan bertambah”. Komnas HAM selain mengungkap 5 orang korban tewas, juga menyebutkan 149 orang mengalami cedera dan 23 orang hilang.

Peristiwa 27 Juli masih menyisakan tanda tanya besar tentang latar belakang dan pihak yang harus bertanggung jawab. Pemerintah, dalam hal ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), telah memastikan bahwa peristiwa itu adalah kerusuhan yang ditunggangi organisasi yang bernama Partai Rakyat Demokratik (PRD). ABRI menyampaikan keterkaitan langsung peristiwa 27 Juli tersebut dengan perebutan markas PDI secara paksa. Panglima ABRI (Pangab) Jendral Feisal Tanjung, sehari setelah peristiwa menyatakan bahwa kemelut yang menyangkut PDI ditunggangi oleh oknum, golongan, kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindakan anarkis. Pangab menolak pernyataan bahwa kelompok PDI Soerjadi adalah penyulut kerusuhan tersebut.⁶

⁴Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah para tersangka yang ditangkap pasca peristiwa 27 Juli, lihat Lampiran B. Bandingkan juga dengan Lampiran F.

⁵Lihat Lampiran B.

⁶“Kerusuhan 27 Juli Ditunggangi PRD”, *Suara Merdeka*, 29 Juli 1996.

Mentri Koordinator Politik (Menko Polkam) Soesilo Soedarman seusai memimpin Rapat Koordinasi Politik Kemanan (Rakor Polkam), kepada pers menyatakan bahwa aksi kerusuhan massa tersebut terbukti telah ditunggangi oleh pihak ketiga yang menamakan dirinya PRD, yang gerakannya menggunakan cara-cara PKI, dan kelompok-kelompok yang bermasalah lainnya, yang nyata-nyata melawan Orba.⁷ Pada saat bertemu Soeharto, Soesilo menyampaikan keterlibatan PRD pada peristiwa 27 Juli tersebut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Birgrade Jendral (Brigjen) Amir Sayrifudin saat bertemu dengan Majelis Ulama dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam juga mengklaim bahwa PRD sebagai penjelmaan Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).⁸

Bagi masyarakat, meski tidak terlontar secara terbuka, sesungguhnya mereka sudah faham benar bahwa penyerbuan markas PDI—yang dikomandoi aparat keamananlah—yang menyulut kerusuhan pasca peristiwa 27 Juli tersebut. Huru-hara itu sendiri merupakan bentuk dari luapan kemarahan spontan massa, akibat rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintah Orba. Namun kenyataan ini dialihkan, dengan menempatkan anak-anak muda yang tergabung dalam PRD sebagai kambing hitam. Bahwa PRD-lah dalang dari keseluruhan peristiwa 27 Juli.

Dalam laporan temuannya, Komnas HAM sama sekali tidak mengidentifikasi keterlibatan PRD pada peristiwa 27 Juli tersebut. Menurut laporan Komnas HAM, ada tiga unsur penyebab kerusuhan yang terlibat, *pertama*, unsur pendukung PDI Soerjadi dengan PDI Megawati. *Kedua*, unsur pemerintah/aparat keamanan. *Ketiga*, unsur masyarakat. Komnas HAM juga menyatakan bahwa latar belakang peristiwa 27 Juli adalah pengambilalihan kantor DPP-PDI dengan kekerasan oleh kelompok Soerjadi bersama aparat keamanan.

⁷Siaran Pers Menkopolkam No: 40/Humas Polkam/VII/1996, (Arsip Yayasan LBH Indonesia).

⁸“Yang Mimpin Budiman Sudjatmiko”, *Suara Merdeka*, 30 Juli 1996. Bandingkan dengan, “Catatan: Pelanggaran-Pelanggaran Pelaksanaan Ketentuan KUHAP dalam Proses Penyidikan Para Tersangka Seputar Kasus Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996”, (Arsip Elsam).

Menurut Asmara Nababan, pihaknya tidak menemukan indikasi atau bukti keterlibatan PRD sebagai penyulut peristiwa 27 Juli.⁹

Peristiwa 27 Juli sangat menarik untuk dikaji, bagaimana kita bisa melihat reaksi pemerintah pasca peristiwa tersebut. Setidaknya ada tiga reaksi penguasa pasca peristiwa 27 Juli, yaitu: *pertama*, tindakan fisik terhadap para aktifis di lapangan berupa pukulan fisik, penangkapan, dan penyiksaan. *Kedua*, pembersihan politik dengan jalan menuduh intelektual yang terkait dalam huru-hara tersebut sebagai bentuk melawan negara/pemerintah atau penghinaan kepada pejabat negara. *Ketiga*, mengadili mereka yang dituduh terlibat pada 27 Juli, dengan menggunakan Undang-Undang (UU) Subversi, suatu peraturan yang diciptakan untuk melawan musuh negara.

Awal dari lembaran kelam pada 27 Juli adalah perlakuan buruk pemerintah terhadap PDI dan Megawati. Kerusuhan massa akibat pengambilalihan kantor PDI pada 27 Juli 1996 memang terkait dengan masalah Megawati yang sedang naik popularitasnya, dan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut), yang sedang diusung popularitasnya oleh Jendral Hartono dan para petinggi ABRI sebagai putra mahkota melalui jalur Golongan Karya (Golkar). Keberadaan Megawati sebagai ketua umum PDI membuat resah pemerintah Orba. Soeharto khawatir popularitas Megawati akan menggoyahkan pemerintahannya. Soeharto semakin cemas setelah aktivis PDI, Aberson Sihaloho, menyebarkan formulir berisi dukungan terhadap Megawati untuk menjadi presiden serta ramalan politik Permadi bahwa “Megawati akan menjadi presiden ketiga menggantikan Soeharto”. Oleh sebab itu keluarlah instruksi Soeharto untuk mengganjal Megawati dan para pendukungnya.¹⁰

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Orba untuk menjegal Megawati menuju panggung politik nasional, dari yang ringan hingga yang berat. Namun upaya pemerintah untuk menyingkirkan Megawati tampaknya gagal. Popularitas

⁹Lihat Lampiran B.

¹⁰Benny S. Butarbutar, *Soeyono Bukan Puntung Rokok* (Jakarta: Rima Foundation, 2003), hlm. 158.

Megawati semakin tidak terbendung, dukungan pun datang dari berbagai kalangan. Masyarakat menganggap bahwa Megawati adalah simbol perlawanan rakyat, simbol pemersatu rakyat, untuk melawan rezim yang otoriter.¹¹ Berdasarkan alasan ini, Megawati semakin memantapkan langkahnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, memperjuangkan demokrasi, serta menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Walaupun banyak yang menyebut Megawati sebagai orang yang masih awam dalam berpolitik, namun karir berpolitiknya terus meningkat. Hal ini barangkali sebagai akibat adanya harapan dan kebutuhan warga PDI dan rakyat terhadap figur pembaharuan, pemersatu dan tokoh yang bersih dari *interest* kelompok kepentingan tertentu. Banyak bukti yang menunjukkan adanya keinginan demikian, seperti terlihat melalui respon masyarakat yang selalu menyambut hangat setiap kehadirannya, mengelu-elukan, dan berbagai bentuk simpati terhadap putri bung Karno ini.

Skripsi ini bermaksud memaparkan peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta secara historis dan analitis. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dan bagaimana peristiwa 27 Juli 1996 terjadi?
2. Bagaimana pengaruh peristiwa 27 Juli 1996 terhadap munculnya Megawati dalam panggung politik nasional?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan mudah, lebih relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.¹² Selain itu, dengan adanya pembatasan ruang lingkup

¹¹“Megawati Simbol Perlawanan Rakyat?”, *Media Indonesia*, 10 Desember 1993.

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Madar Maju, 1990), hlm. 19.

juga dapat membantu untuk mempertajam analisis.¹³ Penulisan skripsi ini menggunakan batasan-batasan yang mencakup ruang lingkup temporal, lingkup spasial, dan lingkup keilmuan. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini meliputi cakupan spasial, temporal, dan keilmuan.

Ruang lingkup spasial merupakan batasan wilayah atau daerah, tempat, dan kedudukan objek penelitian. Lingkup spasial pada penelitian yang berjudul “Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999” meliputi lingkup nasional. Meskipun peristiwa 27 Juli hanya terjadi di Jakarta, namun peristiwa tersebut telah mengundang perhatian Presiden Soeharto dan para pejabat negara. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pejabat negara, sehubungan dengan peristiwa 27 Juli adalah dengan menuduh bahwa peristiwa tersebut ditunggangi oleh kekuatan OTB. Tujuan yang dilakukan oleh pejabat negara ini adalah agar meyakinkan publik bahwa 27 Juli adalah suatu bentuk tindakan melawan negara dengan melakukan perebutan atas kekuasaan yang sah. Selain itu, peristiwa tersebut juga telah menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia, suatu gong yang membangkitkan kehendak rakyat untuk mengakhiri kediktatoran, bagi keseluruhan gerakan pro-demokrasi.

Ruang lingkup temporal atau waktu yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara tahun 1996-1999. Meskipun demikian, penulis mengambil batas awal lingkup temporal yang dimulai pada tahun 1993 dengan alasan, *pertama*, adanya peristiwa yang sangat mengejutkan pada masa Orba, yaitu kemunculan Megawati Soekarnoputri pada Kongres Luar Biasa (KLB) PDI tahun 1993 di Surabaya.¹⁴ Hal ini dipandang sebagai ancaman baru yang nyata bagi Soeharto. Munculnya Megawati dan PDI ini berpotensi menjadi “kerikil tajam” bagi eksistensi rezim Soeharto. Untuk itu melalui berbagai cara pemerintah

¹³Taufik Abdullah, “*Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi*”, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia), hlm. xii.

¹⁴“KLB PDI Pastikan Mega Ketua Umum”, *Media Indonesia*, 6 Desember 1993. Bandingkan dengan, “Megawati Nyatakan Diri sebagai Ketua Umum DPP PDI 1993-1998”, *Kompas*, 7 Desember 1993.

tampak berupaya melemahkan PDI melalui campur tangan diberbagai kejadian. Salah satunya dengan menciptakan dualisme kepengrusan di tubuh PDI. Pemerintah untuk itu menganggap kepemimpinan PDI kubu Megawati sebagai ilegal.¹⁵ *Kedua*, rangkaian kejadian yang terjadi sejak tahun 1993, seperti munculnya Megawati pada KLB Surabaya 1993, hingga terjadinya Mimbar Demokrasi pada tahun 1996, turut melatarbelakangi terjadinya peristiwa 27 Juli.

Batas akhir lingkup temporal tahun 1999, dengan alasan bahwa adanya penyelenggaraan Pemilu tahun 1999, dapat dikatakan berjalan dengan sukses sebagai Pemilu paling demokratis semenjak Orba berkuasa di Indonesia. Meskipun masa persiapan tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang signifikan, seperti banyak pakar meramalkan. Meskipun disana-sini masih terdapat kecurangan dan penyimpangan, namun, kekurangan-kekurangan tersebut relatif dapat dianggap wajar karena masa persiapan pemilu yang amat singkat.

Hasil Pemilu 1999 memperlihatkan kekalahan Golkar yang selalu menjadi kekuatan mayoritas mutlak selama Pemilu-Pemilu di bawah rezim Orba. Pada Pemilu 1999 Golkar hanya meraih suara sekitar 22%,¹⁶ padahal dalam pemilu terakhir Orba (1997), partai berlambang pohon beringin ini meraih suara sekitar 76%. Kemerosotan terbesar Golkar terjadi terutama di daerah-daerah pemilihan di Jawa dan Bali. Hasil utama Pemilu 1999 itulah yang menunjukkan adanya perubahan komposisi yang cukup fundamental dalam kepolitikan Indonesia pasca reformasi, terutama dengan memunculkan partai produk reformasi seperti PDI-P.

¹⁵Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 50.

¹⁶Komisi Pemilihan Umum, Hasil Pemilihan Umum tahun 1999, (<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999>, diunduh pada Rabu, 20 April 2016).

Kemenangan PDI-P pada pemilu 1999 menjadikan bukti bahwa perlawanan Megawati terhadap rezim Orba semakin nyata. Keberpihakan massa PDI semakin terlihat pada Pemilu tahun 1999 yang memberikan dukungan terhadap PDI Mega. Meski bukan menang telak, tetapi PDI-P berhasil meraih lebih dari 35% suara. Massa pendukungnya memaksa Mega menjadi Presiden. Walaupun pada kenyataannya nama Mega tidak dipilih pada saat SU MPR 1999, melainkan Abdurrahman Wahid yang ditentukan menjadi presiden, dengan didorong oleh kekuatan poros tengah.

Ruang lingkup keilmuan dari skripsi ini dapat digolongkan ke dalam disiplin ilmu sejarah, karena disiplin ilmu sejarah mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau.¹⁷ Demikian pula ilmu sejarah mempunyai beberapa lapangan khusus atau tematis dalam mendekati obyek sejarah, seperti sejarah sosial, sejarah militer, sejarah politik dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema ini, maka skripsi ini termasuk ke dalam sejarah sosial-politik. Mengingat obyek dan permasalahan dalam skripsi ini adalah peristiwa 27 Juli 1996 yang menunjukkan kegagalan strategi-politik penguasa rezim Orba untuk menyingkirkan Megawati dari percaturan politik Indonesia. Aksi-aksi yang telah dilancarkan oleh massa di Jakarta itu juga menyajikan bukti bahwa Megawati, pada saat itu, sudah semakin menonjol menjadi lambang perlawanan massa luas terhadap segala ketidakberesan dan ketidaknormalan yang dilakukan pemerintahan Orba.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, merekonstruksi secara kronologis serta menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi, hingga terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta. *Kedua*,

¹⁷Taufik Abdullah, *Di Sekitar Sejarah Lokal di Indonesia* dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, hlm. 321.

menganalisis bagaimana pengaruh peristiwa 27 Juli 1996 terhadap posisi Megawati dalam panggung politik nasional.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengembangkan wawasan berpikir yang lebih luas dan sebagai bahan acuan untuk membangun kerangka pemikiran konseptual, maka berikut ini disajikan tinjauan terhadap beberapa pustaka yang relevan dengan topik penulisan skripsi ini.

Pertama adalah buku *Soeyono Bukan Puntung Rokok* karya Benny S. Butarbutar.¹⁸ Letjen (Purn) Soeyono adalah mantan Kepala Staf Umum (Kasum) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang dicopot dari jabatannya akibat kasus 27 Juli, beliau menulis sebuah biografi yang intinya menjelaskan bahwa kasus 27 Juli adalah blunder politik Orba. Dalam buku tersebut, Soeyono mengungkapkan bahwa kasus 27 Juli merupakan puncak pertarungan dua srikandi dalam panggung politik Indonesia. Sekiranya tidak ada peristiwa 27 Juli 1996, mustahil Megawati Soekarnoputri bisa populer, hingga menjadi Presiden menggantikan Abdurrahman Wahid. Alih-alih menggembosi Megawati dan mengorbitkan Siti Hardiyanti Rukmana, pengambilalihan kantor DPP-PDI di Jl. Diponegoro No. 58, Jakarta, merupakan blunder politik Orba. Kerusuhan massa sebagai akibat pengambilalihan kantor DPP-PDI pada 27 Juli 1996 yang menewaskan sedikitnya 5 orang dan 149 orang luka-luka itu memang terkait dengan masalah Megawati yang sedang naik popularitasnya dan Siti Hardiyanti Rukmana yang juga sedang diusung popularitasnya, antara lain oleh Hartono dan kawan-kawannya.

Karya Benny S. Butarbutar ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan penelitian ini, karena buku tersebut mengungkapkan secara gamblang peran para petinggi ABRI antara lain mantan Kepala Staff Angkatan Darat (Kasad) Hartono, mantan Kepala Sosial Politik (Kassospol) ABRI Syarwan Hamid, mantan

¹⁸Benny S. Butarbutar, *Soeyono Bukan Puntung Rokok* (Jakarta: Rima Foundation, 2003).

Panglima Komando Startegis Angkatan Darat (Pangkostrad) Prabowo, mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya Sutiyoso, mantan kepala BIA Syamsir Siregar dan Mantan Menteri Pertahanan Keamanan (Menhakam) Wiranto, yang berusaha merebut hati keluarga Cendana agar mendapatkan tempat dalam politik nasional. Para Jendral tersebut belomba-lomba untuk membungkam segala upaya yang tidak sejalan dengan Orba.

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di dalam buku ini lebih menonjolkan biografi Soeyono hingga menjadi Kasum ABRI. Sementara pada penelitian ini mengkaji mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa 27 Juli dan mengungkap bagaimana dampak dari peristiwa tersebut bagi Megawati dalam panggung politik nasional.

Kedua adalah buku karya Arif Zulkifli yang berjudul *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia – Studi Komunikasi Politik*,¹⁹ buku yang diangkat dari sebuah skripsi ini berusaha menjelaskan bahwa hadirnya Megawati memimpin PDI atas dukungan arus bawah. Ia terpilih melalui KLB Surabaya, dan kemudian dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, 1993, dengan mengalahkan calon lain yang mendapat lampu hijau dari penguasa—hal ini merupakan fenomena baru dalam sejarah politik Orba. Tidak salah bahwa fenomena semacam ini disebut sebagai peristiwa demokrasi.

Seperti tersurat di dalam judulnya, buku ini meneliti tanggapan kelas menengah atau – dalam istilah yang lebih luas – golongan menengah Indonesia mengenai kemunculan Megawati. Mengapa kelas menengah? Sebagai dampak dari pembangunan ekonomi selama ini, lapisan kelas menengah Indonesia telah membengkak secara substansial. Perkembangan ini secara sendirinya memberikan sebuah optimisme. Kelas menengah yang dianggap pembawa nilai-nilai rasional dan demokrasi diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan. Harapan semacam itu barang tentu didasarkan pada pengalaman Barat dimana kebangkitan kelas menengah yang menyertai Revolusi Industri telah menjadi faktor penentu lahirnya demokrasi.

¹⁹Arif Zulkifli, *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia – Studi Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Utama Garfity, 1996).

Adapun relevansi buku ini dengan penulisan yang dilakukan peneliti, memberikan gambaran kepada penulis bahwa dengan bertambahnya lapisan kelas menengah secara fisik, yang tidak dibarengi dengan menguatnya nilai-nilai yang menopang demokrasi, yang pada akhirnya kelas menengah berpihak pada kepentingan materiil mereka sendiri yang dalam kasus Indonesia, banyak tergantung pada negara. Kajian ini sangat menarik karena memberikan korelasi antara kelas menengah dan demokrasi, serta menyinggung sejarah dan potensi konflik dalam partai *wong cilik*, termasuk terdusurnya Megawati yang secara politis berdampak sangat luas.

Sementara yang membedakan penelitian ini dengan buku tersebut adalah cakupan dalam pembahasannya. Dalam buku tersebut lebih menekankan peranan kelas menengah serta konflik internal partai PDI hingga mencapai puncaknya pada KLB Surabaya 1993. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa 27 Juli 1996 hingga pengaruhnya bagi karir Megawati Soekarnoputri dalam panggung politik nasional. Dengan demikian maka ada perbedaan antara buku *PDI di Mata Golongan Menengah Indonesia – Studi Komunikasi Politik* dengan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.

Ketiga adalah pustaka *Biografi Politik Megawati Soekarno Putri 1993 – 1996* karya Ahmad Bahar.²⁰ Dalam buku ini menjelaskan kemunculan Megawati Soekarnoputri dalam pentas politik tanah air, ternyata mampu menjadi pelopor bagi sosok wanita yang terjun dalam politik. Nama Megawati menjadi begitu menarik sebab ia adalah salah satu putri presiden pertama RI, Soekarno. Lebih menarik lagi bahwa ia adalah satu-satunya putri yang pernah menjadi ketua umum organisasi sosial politik di tanah air pada masa Orba. Kemunculannya sebagai ketua umum DPP-PDI yang seolah merupakan kemenangan “arus bawah” menambah tingkat popularitas Megawati.

Pustaka karya Ahmad Bahar ini memiliki relevansi yang cukup erat dalam penelitian ini, karena dalam pembahasannya menjelaskan hambatan ataupun

²⁰Ahmad Bahar, *Biografi Politik Megawati Soekarno Putri 1993 – 1996* (Yogyakarta: Pena Cendikia, 1996).

perangkap yang dibuat untuk menjatuhkan Mega semenjak ia menduduki jabatan Ketua Umum PDI pada tahun 1993, sampai dengan “kudeta” terhadapnya melalui kongres PDI di Medan tahun 1996. Menurut Dr. Riswanda Imawan dalam pengantarnya, kongres itu sendiri sudah “sukses” menjatuhkan Mega dari kedudukan formalnya. Namun tidak sulit dibantah bahwa hasil kongret dari Kongres PDI IV di Medan adalah membuat Megawati Soekarnoputri menjadi kekuatan baru dalam kancah politik Indonesia. Jika sebelumnya Mega hanya menjadi pemimpin PDI, sekarang berubah menjadi pemimpin sekaligus simbol bagi siapa saja yang masih percaya pada prinsip-prinsip moral dan etika politik.

Walaupun relevansi pustaka ini sangat erat dengan penelitian penulis, akan tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Pustaka tersebut memiliki lingkup temporal tahun 1993-1996. Di dalam pustaka tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana pengaruh peristiwa 27 Juli bagi Megawati. Berbeda dengan penelitian ini, yang memiliki lingkup temporal 1993-1999. Pada penelitian ini berusaha menyempurnakan penelitian terdahulu, serta berusaha mengungkap pengaruh 27 Juli bagi Megawati sendiri.

Keempat, adalah pustaka *Membongkar Kudatuli, Menggugat Megawati*, karya Agus Siswantoro.²¹ Dalam pustaka ini disebutkan, sebagai ketua umum PDI hasil Munas, Megawati dijadikan musuh yang sangat berbahaya oleh Soeharto, sehingga harus disingkirkan dari panggung politik. Pemerintah Soeharto pun merancang operasi “Naga Merah” untuk mendongkel Megawati, yang kemudian melahirkan kongres rekayasa di Medan, yang lebih dikenal dengan nama kongres IV Medan. Intervensi Soeharto terhadap PDI ternyata membangkitkan perlawanan yang luar biasa. Kondisi ini membuat Soeharto geram. Hingga meletuslah tragedi berdarah 27 Juli 1996 yang juga dikenal dengan peristiwa Sabtu Kelabu.

Megawati yang lahir akibat dari sikap sewenang-wenang Orba, kemudian mendapat dukungan penuh dari rakyat hingga popularitasnya semakin melambung. Kisah antara Megawati dan 27 Juli tampaknya sulit untuk dipisahkan, namun upaya untuk mengusut tuntas dan transparan dalang di balik

²¹Agus Siswantoro, *Membongkar Kudatuli, Menggugat Megawati* (Jakarta: Gerakan Pemuda, 2004).

peristiwa 27 Juli tidak pernah dilakukan oleh Megawati. Ketidakseriusan Megawati dalam menungkap kasus 27 Juli ternyata membuat sejumlah tokoh politik heran. Menurut Munir Koordinator Kontras, dirinya pernah bertemu dengan Megawati dan membicarakan tentang kelanjutan 27 Juli, namun dirinya sangat kecewa lantaran tidak ada perhatian dari Megawati untuk mengungkap kasus tersebut.

Berbeda dengan penelitian ini, di dalam pembahasan buku tersebut lebih menitik beratkan gugatan, serta tekanan terhadap Megawati saat menjadi Presiden untuk membongkar dalang di balik peristiwa 27 Juli. Dalam buku tersebut juga dijelaskan rasa kekecewaan para pendukung Megawati atas sikap yang diambilnya pada saat menjabat menjadi Presiden. Megawati pun dianggap penghianat. Namun dalam penelitian ini tidak mengungkap mengenai gugatan yang dilakukan oleh pendukung Megawati, melainkan penelitian ini berusaha mengungkap secara kronologisasi, dan sebab-musabab yang melatarbelakangi peristiwa 27 Juli. Jadi, meski memiliki beberapa persamaan namun tetap memiliki perbedaan yang cukup jelas antara buku tersebut dengan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengungkap latar belakang dan mencari faktor-faktor kausalitas, proses serta akibat dari peristiwa kerusuhan di Jakarta pada 27 Juli 1996, perlu digunakan pendekatan historis.²² Pendekatan Historis mampu mengungkap korelasi, kecenderungan, dan pola perkembangan fenomena yang terjadi. Dengan mengkaji peristiwa gerakan massa tersebut akan dapat diungkapkan kausalitas dan proses terjadinya gerakan massa yang saling terkait di dalamnya.

Sebagai sebuah produk dari proses dinamika sosial, gerakan massa—dengan segala variannya—sejatinya dapat dijelaskan melalui teori gerakan sosial yang telah banyak menjadi rujukan dan pisau analisis dalam membedah pergolakan dan dinamika sosial yang berlangsung di masyarakat.

²²Gilbert J. Garraghan S.J. *A Guide To Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957). Lihat dalam Chusnul Hayati, *Peristiwa Cimarame Tahun 1919* (Semarang: Mimbar Office, 2000), hlm. 10.

Gerakan sosial menurut Rajendra Singh adalah proses produksi dan reproduksi yang terus menerus dari persoalan-persoalan sosial yang tidak terpecahkan dan isu-isu sosial yang hangat dan terkait dengan problem ketimpangan sosial, penguasaan dan penundukan individu dan kelompok; struktur dominasi dan kekuasaan yang satu atas yang lainnya—berupa kasta, kelas, kelompok etnis, gender atau pada level global, suatu negara atas negara lainnya.²³

Secara khusus Rajendra Singh menguraikan gerakan sosial mengekspresikan dan merujuk pada sebuah arus deras cita-cita dan aktivitas yang relatif pejal dan terkonsentrasi dari sebuah kolektivitas yang relatif terorganisir. Gerakan sosial merujuk pada tuntutan-tuntutan terorganisir dari kelompok-kelompok manusia demi atau menentang beberapa nilai, norma, atau praktik sosial, termasuk praktik-praktik dari sistem kekuasaan dan otoritas pada suatu waktu. Semua gerakan sosial dicirikan oleh kelaziman adanya inti kritis, isi dan muatan konfliktual, dan kontradiksi-kontradiksi sosial.

Frank Feuntes dalam *Nine Thesis on Sosial Movement* (1987) secara spesifik menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan artikulasi dari konflik dan ketegangan dalam masyarakat pada umumnya. Lebih jauh para teoritis diatas menjelaskan bahwa situasi-situasi ketimpangan dan dominasi sosial, jika dipertahankan dan dijalankan oleh institusi-institusi dan lembaga-lembaga sosial pada gilirannya akan menghasilkan situasi balik dimana terjadi perlawanan, penolakan dan pemberontakan menentang sistem-sistem dominasi.²⁴

Dalam kaitan ini untuk kepentingan penelitian, penulis ketengahkan Teori Deprivasi Relatif (*Relative Deprivation Theory*) Ted Robert Gurr sebagai pijakan teoritis terhadap fokus gerakan massa yang penulis teliti. Teori Deprivasi Relatif secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gejolak sosial muncul dan mengambil

²³Rajendra Singh, *Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2001). hlm. 19.

²⁴Suharko, “Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani” (Laporan Penelitian Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, Juli 2006), hlm. 4-5.

bentuk gerakan sosial politik pada saat ada kesenjangan antara nilai pengharapan (*value expectation*) dan nilai kemampuan (*value capabilities*) dalam masyarakat.²⁵

Teori ini menegaskan bahwa permasalahan utama dari kemunculan pergolakan sosial adalah faktor yang dalam bahasa Gurr disebut dengan istilah *Relative Deprivation* (RD). Dalam teori ini ditekankan—dimana terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* pada gilirannya akan membawa pada perasaan ‘keterampasan’. Hal yang dirampas ini tergolong sebagai nilai ataupun kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Mulai dari nilai kesejahteraan, kekuasaan, dan interpersonal.

RD adalah sebuah fenomena sosiologis dan psikologis yang berwujud karena kesadaran atas berbedanya harapan dan kenyataan. Secara faktual dalam hidup ini setiap orang, setiap kelompok, setiap masyarakat dan setiap Negara, selalu memiliki nilai-nilai harapan (*value of expectation*), disamping nilai-nilai kemampuan (*value of capability*). Jika harapan-harapan itu dianggap begitu wajar akan tetapi selalu saja tidak dapat terpenuhi, maka timbullah perasaan aneh yang jika terus-menerus dan berkepanjangan dapat menjurus kepada apa yang disebut perasaan keterampasan. Apalagi usaha dan perjuangan yang bersifat normal untuk meraih harapan itu sudah dianggap tidak memadai. Itulah inti konsep RD.

Setiap orang, setiap kelompok, setiap masyarakat dan setiap Negara, pada akhirnya tahu apa yang menghalangi mereka dalam berusaha memperjuangkan harapan-harapan mereka untuk hidup (sejahtera) sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kemajuan dan harapan-harapan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba mengenali semua itu, menstrukturkannya dan memposisikannya sebagai musuh.

Faktor keterampasan itu pada saatnya akan memicu aksi-aksi sosial politik sebagai usah kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, bahkan meski berhadapan dengan penentang dan konflik. Aksi-aksi mereka lahir dari rasa ketidakpuasan, penyangkalan dan terampas secara kolektif yang sama-

²⁵Ted R. Gurr, *Why Men Rebel*, (Princeton: Princeton University Press, 1970), hlm. 3.

sama dialami oleh sejumlah besar orang yang merasakan situasi yang sama dan memiliki kesadaran yang sama bahwa mereka telah disingkirkan sampai pada tingkatan tertentu sehingga mendorong mereka untuk bergabung bersama mengidentifikasi pihak musuh yang bertanggungjawab atas penderitaan mereka dan yang mereka lawan pertama kali.

Mengacu pada konsep di atas, dalam membedah kasus 27 Juli 1996, penulis menggunakan konsep RD. Adanya ketimpangan sosial, penundukan individu maupun kelompok, dan dominasi dari pemerintahan Soeharto, memunculkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat untuk menentang beberapa nilai, norma, atau praktek sosial, termasuk praktik-praktik dari sistem kekuasaan dan otoritas pada saat itu. Fenomena ini sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif demi terwujudnya demokratisasi di Indonesia. Kesadaran masyarakat kelas bawah akan nilai kesejahteraan, kekuasaan, dan interpersonal, memunculkan perasaan keterampasan yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto. Fenomena kesadaran atas berbedanya harapan dan kenyataan, membuat rakyat yang murka terhadap pemerintah Soeharto melakukan aksi perlawanan pada saat peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli juga dikatakan sebagai bentuk kekerasan politik, dimana perebutan kantor DPP PDI secara paksa yang bertentangan dengan UUD 1945. Disamping itu penggunaan aparat keamanan untuk berhadapan langsung dengan rakyat, menggambarkan langkah-langkah kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Orba. Hingga munculnya Megawati dikancah politik nasional sebagai lambang perlawanan rakyat, pemersatu rakyat, untuk memperjuangkan harapan-harapan mereka demi hidup (sejahtera) sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kemajuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian sejarah seperti halnya penelitian dalam disiplin yang lain, didasarkan pada ketertarikan, keingintahuan, kemampuan untuk mencatat informasi dengan

cepat, dan kegigihan dalam menapaki jalan yang sulit.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.²⁷

Pertama adalah heuristik, kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan atau relevan dengan tujuan penelitian, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain arsip dan dokumen-dokumen dari Yayasan LBH Indonesia, Kontras, Elsam, arsip dari DPP-PDI Perjuangan. Arsip dan dokumen yang diperoleh penulis diantaranya, laporan Komnas HAM mengenai data korban pasca 27 Juli, catatan jalannya persidangan terdakwa 27 Juli dan pesan harian ketua umum DPP-PDI menjelang pemilu 1997. Beberapa surat kabar dari depo arsip Suara Merdeka, Suara Pembaharuan, Tempo, Media Indonesia, Gatra, serta Kompas. Surat kabar yang digunakan oleh penulis berisi tentang kemunculan Megawati, tidak direstunya PDI pimpinan Megawati, dan kronologisasi jalannya peristiwa 27 Juli. Selain itu sumber primer juga diperoleh melalui pemutaran film peristiwa 27 Juli milik Yayasan LBH Indonesia dan Elsam. Sementara sumber-sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka baik di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah, dan Perpustakaan Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro.

Kedua, kritik sumber yaitu kegiatan menguji keaslian sumber baik bentuk maupun isinya (kritik ekstern dan intern). Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keotentikan sumber secara fisik, artinya apakah sebuah sumber otentik atau tidak, peneliti sejarah harus mengajukan paling tidak lima pertanyaan terhadap sumber sejarah. *Pertama*, kapan sebuah sumber sejarah itu dibuat, *kedua*, di mana naskah itu dibuat, sedangkan kritik intern dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat dipercaya, yang dalam ilmu sejarah disebut dengan istilah fakta sejarah.

²⁶Pamela Brooks, *How to Research Local History*, (Oxford: How to Books, 2008), hlm. 2.

²⁷Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, di Indonesiakan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1945), hlm. 15.

Ketiga, interpretasi yaitu kegiatan menghubungkan-hubungkan fakta-fakta sejarah yang sudah diperoleh melalui kritik sumber dalam hubungan yang harmonis, yaitu hubungan kronologis dan hubungan kausal atau sebab akibat. Hal ini perlu dilakukan karena sering kali fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah belum menunjukkan suatu kebulatan yang bermakna dan baru merupakan kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan.²⁸ Berbagai fakta sejarah yang lepas satu sama lain harus dirangkai-rangkaikan atau dihubungkan-hubungkan hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.

Tahap terakhir historiografi atau rekonstruksi adalah langkah atau tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, yaitu kegiatan menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi kisah sejarah dalam berbagai bentuknya, yang dalam tulisan ini adalah skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999” ini disusun dalam lima bab secara berurutan yaitu sebagai berikut.

Bab I atau pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan gambaran umum yang membahas mengenai kondisi politik pada masa akhir demokrasi terpimpin, hingga menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto, dengan mengidentifikasi secara historis, diharapkan penulis dapat mengetahui latar belakang kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia. Pada subbab *pertama*, menjelaskan mengenai struktur politik sebagai gambaran untuk mengetahui keadaan politik nasional dari masa demokrasi terpimpin hingga masa Orba. Subbab *kedua*, menjelaskan mengenai kondisi partai politik. Subbab *ketiga*, menjelaskan pengebirian partai politik yang dilakukan oleh

²⁸Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2005), hlm. 101-104.

penguasa. Pada bab ini dijelaskan latar belakang dan sebab-sebab dilakukannya fusi partai oleh pemerintah. Subbab *keempat*, menjelaskan dominasi Golkar, pembahasan pada bab ini berusaha memberikan gambaran mengenai peran partai politik, karena selama masa pemerintah Orba, Golkar menjadi partai yang sangat dominant, yang menyebabkan partai politik selain Golkar hanya berfungsi menjelang pemilu.

Bab III membahas mengenai latar belakang dan penyebab terjadinya Peristiwa 27 Juli 1996. Pada subbab *pertama*, membahas mengenai sejarah terbentuknya PDI sebagai hasil dari fusi partai yang dilakukan pemerintah Orba. Fusi partai ini ternyata membawa konflik baru yang berkepanjangan di tubuh PDI. Subbab *kedua*, membahas KLB Surabaya sampai dengan Kongres Medan. Pada KLB Surabaya adalah sebagai langkah awal Megawati menuju panggung politik nasional, karena nama Megawati untuk pertama kalinya muncul sebagai calon ketua umum PDI. Hingga dilaksanakannya Kongres rekayasa di Medan, sebagai bentuk kongkrit penolakan pemerintah terhadap kedudukan Megawati. Subbab *ketiga*, intervensi pemerintah di tubuh PDI, dalam subbab ini menjelaskan mengenai berbagai upaya pemerintah untuk mencampuri urusan internal PDI. Subbab *keempat*, dualisme kepemimpinan DPP-PDI, sebagai akibat tidak diakuinya Megawati, maka pemerintah mengangkat kembali Soerjadi sebagai PDI tandingan. Subbab *kelima*, aksi mimbar bebas. Subbab ini adalah sebagai bentuk gambaran penolakan rakyat terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyingkirkan Megawati dari kedudukannya. Subbab *keenam*, menjelaskan mengenai jalannya peristiwa 27 Juli, sebagai puncak dari rangkaian konflik yang terjadi dalam tubuh PDI.

Bab IV memuat mengenai pengaruh Peristiwa 27 Juli 1996 terhadap karier politik Megawati dalam panggung politik nasional. Pada subbab *pertama*, membahas mengenai kegetiran pasca 27 Juli, dimana pemerintah menuduh para satgas PDI Megawati dan tokoh intelektual sebagai dalang dari huru-hara tersebut. Subbab *kedua*, membahas mengenai masa kelam Megawati menuju panggung politik. Dalam subbab ini memberi gambaran bagaimana latar belakang Megawati hingga dicalonkan menjadi ketua umum PDI, yang kemudian dianggap berbahaya

oleh pemerintah Orba. Subbab *ketiga*, membahas mengenai dukungan arus bawah terhadap PDI Mega. Dukungan yang diberikan terhadap Megawati ini ternyata semakin memantapkan langkahnya untuk melawan pemerintah Orba yang otoriter. Hingga pasca 27 Juli, popularitas Megawati semakin mencuat, bahkan Mega dianggap sebagai lambang perlawanan arus bawah. Subbab *keempat*, menjelaskan perubahan PDI Mega menjadi PDI-P. Perubahan ini dilatarbelakangi karena belum diakuinya PDI Megawati hingga menjelang pemilu 1999. Subbab *kelima*, menjelaskan mengenai pencalonan Megawati menjadi presiden. Subbab *keenam*, membahas kemenangan PDI Mega pada pemilu 1999. Kemenangan ini sebagai bentuk keberhasilan Megawati karena dirinya tetap teguh terhadap pendiriannya untuk membela kepentingan massa-rakyat.

Bab V Penutup, berisi simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Diharapkan melalui bab ini, dapat diperoleh benang merah mengenai latar belakang terjadinya peristiwa 27 Juli dan pengaruhnya bagi Megawati Soekranoputri.